



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

LITERASI UNTUK KEMAJUAN BANGSA: TANTANGAN DAN SOLUSI

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Saat ini, DPR RI, terutama Komisi X, sedang memfokuskan perhatian pada literasi dan perpustakaan dalam pengawasannya terhadap implementasi undang-undang dan kebijakan pemerintah. Pengawasan ini menjadi penting karena pada tahun 2021, Indonesia mengalami masalah darurat literasi dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan, meskipun telah ada undang-undang dan kebijakan pemerintah seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), Gerakan Literasi Sekolah, dan program Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Selain itu, literasi juga diatur baik secara implisit maupun eksplisit dalam beberapa undang-undang, antara lain UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Namun, pelaksanaan kebijakan literasi dan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara multisektor oleh pemerintah, dengan melibatkan program-program dari berbagai kementerian/lembaga. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan literasi di Indonesia jika dilihat dari segi kerangka kelembagaan dan regulasi.

Literasi dan perpustakaan digital saling terkait di era digital saat ini. Di masa depan, literasi yang baik diperlukan untuk menghadapi tantangan global dan persaingan. Keduanya memainkan peran penting dalam membangun pondasi untuk kemajuan bangsa. Literasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi, sementara perpustakaan digital adalah cara untuk menyediakan dan mengakses informasi secara *online* melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kedua hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan daya saing suatu negara di era globalisasi.

Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan berkomunikasi dengan informasi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, partisipasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, banyak orang memiliki tingkat literasi yang rendah karena beberapa alasan, seperti akses dan kualitas pendidikan yang terbatas, kurangnya fasilitas pembelajaran, kurangnya bahan bacaan, serta kurangnya dukungan dan kesadaran akan pentingnya literasi. Tingkat literasi yang rendah memiliki dampak negatif pada berbagai aspek dan memperburuk kesenjangan sosial, ekonomi, dan informasi dalam masyarakat. Data dari organisasi internasional dan BPS menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peringkat literasi, budaya baca, minat baca, dan kemampuan membaca yang rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan antara remaja berbakat dan permintaan di sektor teknologi.

Keterbatasan akses terhadap literatur dan informasi berkualitas menghambat literasi masyarakat di era globalisasi. Keterbatasan ini berdampak negatif terhadap perkembangan individu dan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi dan akses informasi, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya, menyediakan fasilitas pembelajaran dan bahan bacaan yang baik, mengembangkan program literasi dan perpustakaan digital yang efektif sesuai kebutuhan dan minat masyarakat, serta memperluas infrastruktur literasi di seluruh masyarakat.

Literasi dan perpustakaan memiliki dampak pada pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, di Indonesia, literasi dan perpustakaan digital masih menghadapi tantangan. Masalahnya termasuk akses terbatas ke literatur dan informasi berkualitas, minat baca yang rendah, keterampilan literasi masyarakat yang kurang, dan perubahan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan program literasi dan perpustakaan digital yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Langkah ini melibatkan integrasi literasi dalam kurikulum pendidikan, pembuatan peta jalan literasi, sinergi dengan berbagai pihak terkait, dan pengembangan perpustakaan, termasuk pojok baca dan perpustakaan desa. Semua ini penting untuk kemajuan bangsa.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI dapat mendukung program literasi dan perpustakaan digital dengan cara berikut.

- Melakukan sinergi dengan alat kelengkapan DPR lainnya untuk meningkatkan literasi Indonesia;
- membuat undang-undang dan kebijakan yang mendukung program tersebut;
- mendorong kerja sama antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam unsur pentahelix;
- mengintegrasikan literasi dalam kurikulum pendidikan dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi;
- meminta pemerintah untuk menyusun peta jalan literasi;
- mengawasi pelaksanaan program dan anggaran literasi;
- menjadi advokat bagi masyarakat dengan memperjuangkan pentingnya literasi dan perpustakaan;
- mengadvokasi peningkatan alokasi anggaran untuk literasi; dan
- mendorong penerapan optimal undang-undang terkait literasi.

Sumber

badanbahasa.kemdikbud.go.id, 19 Mei, 7, 9, dan 12 Juni 2023;
dpr.go.id, 13 dan 14 Juni 2023;
inspirasiendidikan.co.id, 15 Juni 2023; dan
m.metrotvnews.com, 13 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023